



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM OLEH PT. PLN RAYON PASIR PANGARAIAN  
DI KEC. UJUNGBATU DESA SUKADAMAI MENURUT  
UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Konsentrasi Hukum Tata Negara



Oleh :

**MEDDY MELDIOS**

**11627103852**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYRAIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul : **PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH PT.PLN RAYON PASIR ANGARAIAAN DI KEC. UJUNGBATU DESA SUKADAMAI MENURUT UU NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Ditulis Oleh : MEDDY MELDIOS

NIM : 11627103852

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

ASRIL, S.H.I., M.H.

NIP. 197604202009011008



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul , yang ditulis oleh :

Nama : Meddy Meldios  
 NIM : 11627103852  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqashkan pada:  
 Hari / Tanggal : Selasa, 07 April 2020  
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2020 M

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Musrifah., SH, MH**

Penguji I  
**Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Penguji II  
**Firdaus, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang bagaimana tatacara pengadaan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum, meskipun untuk kepentingan umum tetap lah harus menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pemilik tanah sebelumnya dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan keadilan dengan cara melakukan proses konsultasi publik dalam pengadaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses konsultasi publik terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Kec. Ujungbatu Desa Sukadamai.

Masalah pokok dalam skripsi ini adalah proses konsultasi publik terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sejatinya memiliki maksud dan tujuan agar terpenuhinya hak-hak pihak yang berhak atas tanah tersebut. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut belum terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masyarakat merasa apa yang menjadi hak mereka tidak terpenuhi.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian dan juga kepada masyarakat Desa Sukadamai yang Terkena dampak dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian populasi dari penelitian ini adalah 1 orang Manager PLN, 1 orang Kepala Desa dan 20 orang masyarakat yang tanahnya terkena dampak.

Hasil Penelitian ini menunjukan pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Kec. Ujungbatu Desa Sukadamai tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dilakukan proses konsultasi publik terhadap pengadaan tanah tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah ini adalah Kurang Pemahaman Pihak yang melakukan pengadaan tanah terhadap regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, kurangnya waktu yang dimiliki untuk melakukan proses konsultasi publik, serta domisili warga terkena dampak pembangunan yang jauh dari tempat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH PT.PLN RAYON PASIR PANGARAIAAN DI KEC. UJUNGBATU DESA SUKADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga mengatarkan kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang menmbangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tinggimya kepada:

1. Ayah tersayang Amrizal dan emak tercinta Dewi Sartika, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. serta Datuk, Nenek, Mamak dan Tante serta Sepupu penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Kastulani S.H, MH selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Asril S.HI, S.H, M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak Juloko Saragih selaku Manager PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian beserta staf, Bapak Afrizal selaku Kepala Desa Sukadamai, dan masyarakat Sukadamai yang telah memberikan data-data dan informasi yang di perlukan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

*Wassalam.*

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

**MEDDY MELDIOS**  
NIM. 11627103852

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rokan Hulu.....	18
B. Gambaran Umum PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian.....	19
C. Aktivitas dan Perkembangan PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian .....	28
D. Gambaran Umum Desa Sukadamai .....	34

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanahan .....	40
B. Teori Hukum Pertanahan .....	41
C. Sumber Hukum Tanah Nasional .....	44
D. Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum Menurut UU NO 2 Tahun 2012.....	49
E. Tinjauan Umum PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian .....	53
F. Konsultasi Publik .....	59

### BAB IV PEMBAHASAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada PT. Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) Rayon Pasir Pangaraian di Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu .....	62
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu .....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel .....	10
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Sukadamai .....	38
Tabel 2.2 Mata Pencarian Penduduk Desa Sukadamai .....	39
Tabel 4.1 Pihak Yang Berkewajiban Melakukan Pemberitahuan/Sosialisasi Mengenai Pengadaan Tanah .....	70
Tabel 4.2 Pihak Yang Berkewajiban Melakukan Pemberitahuan/Sosialisasi Mengenai Pengadaan Tanah .....	71
Tabel 4.3 Masyarakat Memahami Bagaimana Alur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 .....	71
Tabel 4.4 Masyarakat Mengetahui Harus Ada Nya Konsultasi Publik Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	72
Tabel 4.5 Pihak Yang Berkewajiban Dalam Hal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sudah Melakukan Hal Yang Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 .....	73
Tabel 4.6 Pihak Yang Membutuhkan Tanah Melakukan Konsultasi Publik Dengan Para Pihak Yang Memiliki Tanah .....	74
Tabel 4.7 Masyarakat Merasa Bahwa Proses Yang Dilakukan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Desa Sukadamai Tidak Memenuhi Azaz Keadilan .....	74
Tabel 4.8 Masyarakat Merasa Keberatan Jika Lahan Mereka Diambil Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .....	75
Tabel 4.9 Perlu Adanya Sosialisasi Lebih Lanjut Mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .....	76

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Tanah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis. Tanah juga merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum. Pembangunan tidak akan terjadi tanpa adanya ketersediaan tanah yang cukup. Namun, tanah sebagai wadah untuk pembangunan, keberadaannya seringkali menimbulkan masalah antara kepentingan kelompok maupun perorangan. Oleh karena itu pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>

Didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 telah jelas dikatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian dalam pelaksanaannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengadaan tanah. Dimana semua

<sup>1</sup> <http://sinaugeomatika.wordpress.com/2011/12/30/pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-antara-regulasi-dan-implementasi> (diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 20.30 WIB)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak atas tanah memiliki fungsi sosial.<sup>2</sup> Hal ini yang tidak bisa di elakkan oleh masyarakat, sehingga hak individu dapat terkalahkan oleh kepentingan umum.

Kemudian dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) yaitu wewenang hak menguasai negara yang dijalankan oleh pemerintah sebagai perwujudan negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging) meliputi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air,dan ruangangkasa
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi,air,dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum yang mengenai bumi,air,dan ruang angkasa<sup>3</sup>

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan suatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai situlah batas kekuasaan Negara tersebut. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat membenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>3</sup> Rusamadi Murad, *Administrasi Pertanahan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 3





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Mengingat hal tersebut, sehingga pengadaan tanah guna kepentingan umum selalu diiringi dengan proses ganti kerugian atas tanah dan juga harus diiringi juga dengan konsultasi publik. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dimana pengadaan tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.<sup>5</sup> Dan bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.<sup>6</sup> Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berhak mengadakan tanah adalah lembaga negara, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha milik negara.<sup>7</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 10 menyebutkan tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk :

Pertahanan dan keamanan nasional

<sup>4</sup> Bernhard limbong, *pengadaan tanah untuk pembangunan: regulasi, kompensasi, penegakan hukum*, margereta pustaka, Jakarta, 2011, hlm.135

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>6</sup> BPN RI, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: BPN-RI, 2011), hlm. 3.

<sup>7</sup> *Op.Cit*, Pasal 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api

Waduk, bendungan, bendungan irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan santasi, dan bangunan pengairan lainnya

Pelabuhan, bandar udara, dan terminal

Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi

Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik

Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah

h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah

i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah

j. Fasilitas keselamatan umum

k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah daerah

l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau

Cagar alam dan budaya

Kantor Pemerintah/kantor Pemerintah Daerah/Desa

Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa

Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah

Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah

Pasar umum dan lapangan parkir umum<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini yang melakukan pengadaa tanah untuk kepentingan

num ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). PT PLN ini adalah Badan

<sup>8</sup> *Op.Cit.* Pasal 10.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saha Milik Negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara<sup>9</sup>. Dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum banyak faktor yang harusnya juga di perhatikan oleh PLN, seperti tempat pembangunan dan efek pembangunan tersebut terhadap masyarakat sekitar. Seperti dalam penelitian ini, PLN mengadakan pengadaan jaringan distribusi listrik/ yang listrik, PLN haruslah mengkaji tempat pembangunan dan efek pembangunan tersebut terhadap masyarakat.

Didalam melaksanakan pencabutan hak terhadap tanah demi kepentingan umum, tidak boleh dengan cara semena-mena saja ,tapi harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dan mengenai perencanaan untuk pengadaan tanah tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 16 sampai dengan pasal 22 :

#### Pasal 16 :

Stansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:

- a. pemberitahuan rencana pembangunan
- b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

<sup>9</sup> <https://www.pln.co.id/tentang-kami/pedoman-perilaku> (November 2019 pukul 20.45 wib)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 17 :**

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

**Pasal 18 :**

(1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

(2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.

(3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

**Pasal 19 :**

(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.

(2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

(5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.

(6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

#### Pasal 20 :

(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

(2) Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### Pasal 21 :

(1) Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;

b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;

c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;

d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;

e. bupati wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan

f. akademisi sebagai anggota.

#### Pasal 22 :

a) Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), gubernur menetapkan lokasi pembangunan.

b) Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Ibid, pasal 16-22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, Di Desa Suka Damai yang terletak di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, terjadi penggunaan tanah/lahan untuk kepentingan umum, yaitu pihak PT. PLN selaku instansi yang memerlukan tanah membangun tiang listrik baru di tanah masyarakat dan menebang 235 tanaman kelapa sawit usia usia produktif milik masyarakat, tanpa adanya konsultasi publik terlebih dahulu, yang mana dari regulasi diatas menyebutkan bahwa tanah/lahan tersebut baru bisa digunakan setelah melakukan konsultasi publik dan juga sudah melakukan ganti kerugian.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH PT.PLN RAYON PASIR PANGARAIAN DI KEC. UJUNGBATU DESA SUKADAMAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM”**.

#### 1.2 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang melingkupi penelitian ini, maka penulis membatasi masalah mengenai konsultasi publik terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Desa Sukadamai, kecamatan Ujungbatu yang dilakukan dalam periode 2017- 2019



## Rumusan Masalah

Bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon pasir pengaraian menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 di Desa Sukadamai, Kecamatan Ujungbatu?

Apakah faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Desa Sukadamai, Kecamatan Ujungbatu?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 pada PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon pasir pengaraian di kecamatan Ujungbatu
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

### Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan syarif kasim Riau.
2. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pada konsentrasi hukum tata negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3. Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai konsultasi publik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat<sup>11</sup>. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum.<sup>12</sup> Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam badan hukum atau badan pemerintah. Yang mana penulis langsung kelapangan untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data.

### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Ujungbatu Desa Sukadamai, tepatnya di kantor PT. PLN Rayon pasir pangaraian dan jalan surian sebatang Desa sukadamai. Adapun alasan penelitian ini di laksanakan karena diduga ada permasalahan konsultasi publik antara PT. PLN rayon pasir pangaraian dengan masyrakan kecamatan Ujungbatu Desa Sukadamai.

### c. Subjek dan Objek Penelitian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah PT. PLN Rayon Pasir pengaraian, dan Desa Sukadamai.
2. Sedangkan objek dari kajian ini adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon pasir pengaraian dengan masyarakat kecamatan Ujungbatu Desa Sukadamai menurut Undang-Undang NO 2 Tahun 2012.

#### Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 orang antara lain yaitu, 1 orang Manager PLN, 1 orang Kades, dan 20 orang masyarakat Desa Sukadamai yang lahanya di gunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum tersebut. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana sample sama dengan jumlah populasi.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 22 orang.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. Ke-5, hlm. 121

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 219

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase sample
1	Manager PLN rayon pasir pangaraian	1	1	100%
2	Kepala Desa Sukadamai	1	1	100%
3	Masyarakat Desa Sukadamai	20	20	100 %
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

## 2. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari responden atau informan melalui wawancara dan observasi yang terkait dengan pembahasan atau bisa juga diartikan dengan data yang diperoleh peneliti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sumber asli.<sup>15</sup> Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari kepala PLN Rayon Pasir pangaraian, Camat ujungbatu, Kepala Desa Sukadamai, dan masyarakat Desa Sukadamai.

- b. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta literature yang berkaitan dengan kajian pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitisn ini langsung kepada pihak yang berkaitan yaitu :
  1. Manager PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian
  2. Kepala Desa Sukadamai
  3. Masyarakat Desa Sukadamai
- c. Studi kepustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

<sup>15</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 104



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Metode Analisis Data

##### (1) Data Primer

Data Primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>16</sup>

##### (2) Data skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

##### (3) Data Tersier.

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Penulisan

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Cet. ke-6, hlm

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *loc. Cit*, hlm. 13

- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

### Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

#### BAB II

#### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN UMUM

Terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu, profil dan gambaran umum Rokan Hulu, Gambaran Umum dan aktivitas PT.PLN Rayon pasir pangaraian, Gambaran Umum Desa dan masyarakat Sukadamai.

#### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori teori mendasar tentang pengertian hukum pertanahan, sumber hukum tanah nasional, dasar hukum pertanahan, pengertian pengadaan tanah, teori pengadaan tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-undang NO 2 Tahun 2012, tinjauan umum PT. PLN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

Rayon Pasir Pangaraian, pengertian konsultasi publik dan tatacara konsultasi publik.

**HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di PT.PLN rayon pasir pangaraian menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, dan apa masalah yang di hadapi tentang konsultasi publik terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut.

**BAB V****PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

  
 UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Rokan Hulu adalah sebuah kabupaten yang memiliki luas wilayah 7.449.854 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 85 % daratan dan hanya 15 % daerah perairan dan rawa. Secara Geografis Rokan Hulu berada pada 00 25' 20 derajat LU – 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat BT- 1000 565' 59 derajat BT. Kemudian batas wilayahnya adalah :

1. Utara : Kabupaten Pada Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu
2. Selatan : Kabupaten Kampar
3. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir
4. Barat : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat

Rokan Hulu dibagi kedalam 16 kecamatan yaitu : Bangun purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Pandun, Ujungbatu, Pagaran Tapah, dan Pandalian IV Koto. Jumlah penduduknya ada 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduknya 476,98





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru.<sup>19</sup>

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu Mayoritanya adalah Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, dan Mandailing. Dan mayoritas mata pecaharian penduduk nya adalah Pertanian dan Perkebunan.

### Gambaran Umum PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian

PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian adalah Perpanjangan Tangan dari PLN wilayah Riau dan Kepri guna tercapainya visi dan misi perusahaan, kantor PT. PLN Rayon pasir pangaraian terletak di Jalan Koperasi Nomor 3, Pasir Pangarain.<sup>20</sup>

PT. PLN Rayon Pasir Pangarian ini berfungsi melakukan distribusi listrik yang masuk kedalam wilayahnya, kemudian yang masuk kedalam wilayah distribusi PT.PLN Rayon Pasir Pangarian ini adalah Kecamatan Bangun purba, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Ujungbatu dan Kecamatan Rokan IV Koto.<sup>21</sup>

Setiap perusahaan wajib memiliki visi dan misi guna tercapainya tujuan dari perusahaan, Seperti perusahaan pada umumnya PT. PLN Rayon Pasir pangaraian juga memiliki visi dan misi perusahaan. Visi dan misi yang dimiliki oleh PT.

<sup>19</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu) diakses pada 25 Januari 2020

(Jurnal 22,15)

<sup>20</sup>Sumber dari PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian tahun 2020

<sup>21</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian sama dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PT. PLN dimanapun berada. Berikut adalah visi dan misi PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian :

#### 1. Visi

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.

#### 2. Misi

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.<sup>22</sup>

Selain visi dan misi, PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian juga memiliki motto yang berguna untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Motto yang dimiliki oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian sesuai dengan motto PT. PLN itu sendiri yaitu **“Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik”**.

PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pastilah memiliki struktur organisasi guna menunjang kinerja perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi maka pendelegasian wewenang

<sup>22</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di perusahaan menjadi jelas dan teratur. Perusahaan dapat mencapai prestasi kerja yang baik apabila terdapat suatu sistem kerja yang baik pula, dimana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.<sup>23</sup>

PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian memiliki 17 orang pegawai tetap dan  $\pm 50$  orang pegawai kontrak atau *outsourcing*. Tenaga *outsourcing* tersebut antara lain ialah pekerja yang turun langsung ke lapangan dan pekerja yang bertugas di loket pelayanan pelanggan. Sedangkan pegawai tetap yang bekerja di PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian antara lain ialah supervisor teknik, supervisor administrasi dan para staf yang membantu kerja mereka.<sup>24</sup>

Struktur organisasi yang terdapat pada PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian terdiri dari 11 orang termasuk manajer rayon, supervisor teknik, dan supervisor administrasi. Seorang manajer rayon membawahi tiga orang yaitu, analis kerja rayon, supervisor teknik dan supervisor administrasi. Selanjutnya supervisor teknik membawahi junior operator operasi distribusi, junior teknisi pemeliharaan distribusi, dan junior *engineer* pengendalian susut & JPU. Sedangkan supervisor administrasi membawahi junior analis pelayanan pelanggan dan junior *officer* pembacaan meter & pengendalian piutang. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian digambarkan sebagai berikut<sup>25</sup>:

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

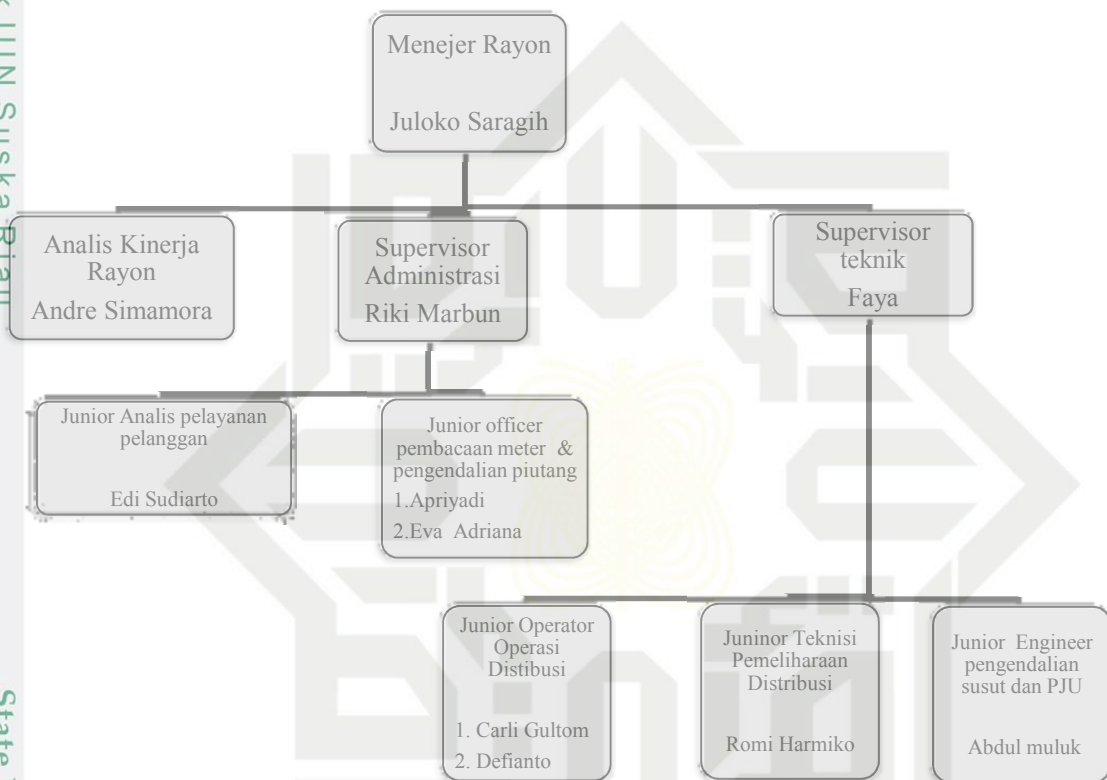
# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Struktur Organisasi PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian



Sumber : PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian 2020

Setiap orang yang tergabung dalam strukur organisasi yan ada di PT.PLN Rayon Pasir Pangaraian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tugas pokok dan fungsi tersebut sudah jelas berbeda antara satu orang dan lainnya. Berikut tugas dan fungsi yang ada di PT.PLN Rayon Gembong .

- Manager Rayon
  - Mengkoordinasikan tugas untuk mencapai taget kinerja perusahaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinasikan pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi listrik.
- c. Mengkoordinasikan penjualan tenaga listrik dan menjamin mutu keandalan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk menekan *losses*.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Keselamatan Kelistrikan (K2) dan Keamanan Keselamatan dan Keselamatan kerja (K3).
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyambungan baru, perubahan daya, administrasi pelanggan, pembacaan meter, proses rekening, dan pengelolaan piutang pelanggan.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan-kebijakan dan produk perusahaan, hak dan kewajiban pelanggan untuk peningkatan citra perusahaan.
- h. Mengkoordinasikan penerimaan dan pengeluaran dana *imprest* dan *receipt* untuk kelancaran operasional perusahaan.
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia dalam penetapan *cascading* KPI, penyusunan dan pembinaan SMUK, serta kompetensi dan karir pegawai.
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan *stakeholder*, penandatanganan dan pertanggungjawaban aspek hukum sesuai dengan kewenangan di wilayah kerjanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan aset perusahaan di wilayah kerjanya.

## 2. Analis Kinerja Rayon

- a. Menyusun data perusahaan yang berhubungan dengan target kinerja.
- b. Membuat rencana dan langkah-langkah pencapaian target kinerja rayon.
- c. Memberi masukan kepada manajer rayon untuk peningkatan hasil kinerja
- d. Menyusun rencana pemakaian Tenaga Listrik Pelanggan TM.
- e. Menyelesaikan Pengaduan Pelanggan TM.

## 3. Supervisor Administrasi

- a. Melaksanakan pencapaian terget kinerja administrasi.
- b. Memastikan pencapaian tingkat mutu pelayanan.
- c. Melaksanakan penyambungan baru, perubahan daya, administrasi pelanggan, pembacaan meter, proses rekening, dan pengelolaan piutang pelanggan.
- d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan dan produk perusahaan, hak dan kewajiban pelanggan untuk peningkatan citra perusahaan
- e. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran dana *imprest* dan *receipt* untuk kelancaran operasional perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengelola sumberdaya manusia dalam penetapan *cascading* KPI, penyusunan/pemantauan dan pembinaan SMUK, serta pembinaan kompetensi dan karir pegawai.
- g. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan mengelola aset perusahaan di wilayah kerjanya.
- h. Membuat konsep kerja sama dengan *stakeholder*.
- i. Mengelola Keamanan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).
4. Junior Analis Pelayanan Pelanggan
  - a. Menyiapkan data potensi pasar dan segmentasi pelanggan.
  - b. Melaksanakan pencapaian tingkat mutu pelayanan
  - c. Melaksanakan program promosi pemasaran dan peningkatan pelayanan pelanggan.
  - d. Menyiapkan penerbitan SIP, penerimaan BP/UJL dan SPJBTL.
  - e. Melaksanakan administrasi, pengarsipan, dan pengolahan DIL/AIL pelanggan.
5. Junior *Officer* Pembacaan Meter dan Pengendalian Piutang
  - a. Memastikan pelaksanaan dan kualitas hasil pembacaan meter secara konvensional dan AMR.
  - b. Melaksanakan pengolahan data (perhitungan) tagihan listrik.
  - c. Menyiapkan tagihan listrik (pencetakan rekening listrik ).
  - d. Memastikan tagihan listrik dan tagihan listrik susulan.
  - e. Memonitor tagihan listrik (rekening).
  - f. Melaksanakan pengawasan piutang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyiapkan laporan piutang pelanggan.
  - h. Menyiapkan proses usulan penghapusan pelanggan ragu-ragu.
  - i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penagihan pelanggan tertentu, antara lain TNI/POLRI & instansi vertikal.
6. Supervisor Teknik
    - a. Melaksanakan pencapaian target kinerja fungsi teknik distribusi
    - b. Melaksanakan pengendalian konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi listrik.
    - c. Menjaga aset dan pemuktahiran data perusahaan distribusi.
    - d. Melaksanakan penyambungan dan pemutusan aliran tenaga listrik.
    - e. Melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk menekan *losses*.
    - f. Melaksanakan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).
  7. Junior Operator Operasi Distribusi
    - a. Menyiapkan data rencana operasi jaringan distribusi dalam keadaan normal atau gangguan untuk menjaga mutu dan keandalan tenaga listrik.
    - b. Melaksanakan operasi jaringan dan proteksinya sesuai SOP untuk menjaga keandalan operasi dan keselamatan penyaluran tenaga listrik.
    - c. Melaksanakan realisasi pencapaian tingkat mutu pelayanan, saidi-saifi dan *losses* sesuai kinerja yang ditetapkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan pencatatan data *counter* PMT, LBS, *Recloser* dan *Sectionalizer*.
  - e. Memelihara alat kerja operasi jaringan distribusi
  - f. Melaksanakan pengukuran Tegangan jaringan distribusi (termasuk trafo) dan tegangan di titik pelayanan serta menyampaikan kepada fungsi terkait.
  - g. Melaksanakan pemulihan gangguan jaringan distribusi.
  - h. Menghitung dan membuat SAIDI/SAIFI dan gangguan trafo.
  - i. Melaksanakan inspeksi jaringan.
8. Junior Teknisi Pemeliharaan Distribusi
    - a. Menyusun perencanaan pemeliharaan jaringan distribusi
    - b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan survei pemeliharaan jaringan distribusi.
    - c. Melaksanakan SOP dan Kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi.
    - d. Menyiapkan rancangan teknis dan RAB pemeliharaan jaringan distribusi
    - e. Menyiapkan SPK/kontrak dan pengawasan kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi.
    - f. Melaporkan progres kerja kegiatan pemeliharaan jaringan distribusi.
  9. Junior Engineer pengendalian susut dan PJU
    - a. Menyiapkan data sasaran target operasi pada pelanggan yang diduga melakukan pelanggaran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3

#### Aktivitas dan Perkembangan PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian

PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian adalah Perpanjangan Tangan dari PLN wilayah guna tercapainya visi dan misi perusahaan, PT. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat. Sektor ketenaga listrikan yang merupakan sektor jasa dituntut untuk menjaga kualitas pelayanan kerja yang baik pada operasionalnya didalam masyarakat. Berikut adalah tugas umum dan tugas pokok yang tercantum dalam fungsi pelayanan pelanggan.

##### 1. Bagian pemasaran

Bertanggung jawab dalam penyusunan rencana penjualan dan pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada serta melaksanakan kegiatan pelayanan khusus yang diprioritaskan untuk pelanggan potensial agar menjamin terciptanya peningkatan kepuasan pelanggan potensial. Berikut adalah fungsi bagian pemasaran :

- b. Menyiapkan perlengkapan administrasi, peralatan kerja dan sarana P2TL.
- c. Melaksanakan P2TL sesuai target operasi.
- d. Menghitung kerugian Kwh akibat pelanggaran.
- e. Melaksanakan inventarisasi dan penerbitan/pembongkaran PJU secara periodik.
- f. Menghitung dan membuat laporan susut distribusi.
- g. Meyusun laporan rutin sesuai bidang tugasnya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun data potensi pasar, rencana penjualan dan perkiraan pendapatan di daerah kerjanya.
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan usaha baru sesuai dengan program yang ditetapkan
- c. Memonitor dan melakukan analisa atas pemakaian energi pada pelanggan pelanggan potensial.
- d. Mengadakan komunikasi dan memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan.
- e. Melaksanakan pembacaan meter dengan *Automatic meter reading* untuk pelanggan potensial.
- f. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian pemasaran.

## 2. Bagian Niaga

Bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan pelanggan, administrasi pelanggan , pembuatan tagihan listrik, dan pengendalian pendapatan untuk menjamin peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan. Berikut adalah fungsi bagian niaga :

- a. Melaksanakan Pengawasan terhadap kegiatan pelayanan pelanggan.
- b. Menyusun dan memelihara Data Induk Pelanggan dan Data Induk Saldo.
- c. Mengawasi kegiatan Pencatatan Meter dan Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembacaan meter.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka pembuatan tagihan listrik.
  - e. Mengamankan dan mengendalikan pendapatan dengan melaksanakan administrasi pelanggan secara tertib.
  - f. Melaksanakan pengawasan dan mengkoordinir kegiatan penagihan dalam rangka pengelolaan piutang
  - g. Menyusun standar mutu pelayanan serta mengendalikan pencapaiannya
  - h. Menyusun laporan sesuai bidang tugas niaga
3. Bagian Distribusi
- Bagian distribusi bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, merencanakan dan melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi untuk menjamin kontinuitas pelayanan dengan mutu dan keandalan yang memadai, serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan dan pengaturan jaringan distribusi agar dicapai perusahaan energi yang efisien. Berikut adalah fungsi dari bagian distribusi :
- a. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pembangun sistem.
  - b. Menyusun SOP dan mengatur pengoperasian jaringan distribusi.
  - c. Menyusun rencana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengelola aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan.
- e. Membuat data peta jaringan dan memelihara akurasi data sesuai dengan perkembangan.
- f. Mengendalikan dan mengawasi fungsi Alat Pembatas dan Pengukur dan menyusun rencana pemeliharanya.
- g. Melaksanakan analisa dan evaluasi susut distribusi serta menyusun upaya pengendaliannya.
- h. Membina dan mengembangkan pekerjaan dalam keadaan bertegangan.
- i. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian distribusi.

## 4. Bagian Keuangan

Bagian keuangan bertanggung jawab dalam pencatatan dan pembukuan aset , perencanaan, dan pengendalian anggaran dan pendapatan sesuai denga prosedur administrasi dan akuntansinya, untuk menjamin pengelolaan anggaran dan pendapatan yang efektif dan efesien guna peningkatan kinerja keuangan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut bagian keuangan memiliki beberapa fungsi :

- a. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan aset.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan serta mengadakan rekonsiliasi dengan fungsi terkait.
- c. Menyusun RAO/UAI sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengatur dan mengendalikan likuidasi keuangan secara optimal
  - e. Melaksanakan supervisi tentang keuangan dan akuntansi terhadap unit asuhnya
  - f. Mengatur dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran investasi maupun operasi
  - g. Menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikannya
  - h. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian keuangan
5. Bagian SDM dan Administrasi
- Bagian SDM dan Administrasi ini bertanggung jawab dalam pengembangan dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan kegiatan kesekretarian dan umum untuk menjamin kelancaran operasional, serta melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemberdayaan lingkungan. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya berikut adalah beberapa fungsi dari bagian SDM dan Administrasi :
- a. Mencatat dan melaksanakan inventarisasi fasilitas kantor serta menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaannya
  - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat perhitungan dan melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai sesuai ketentuan yang ada
  - c. Menyusun dan memelihara data Induk Kepegawaian serta melaksanakan monitoring dan evaluasi SDM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan pembinaan SDM serta menyusun rencana pembanguna SDM
- e. Merencanakan dan mengelola kegiatan kesektarian, umum, dan KS
- f. Mengatur penyelesain masalah hukum yang terkait dengan masalah kedinasan , baik di lingkungan internal maupun eksternal
- g. Mengatur dan melaksanakan program kehumasan dan pemberdayaan lingkungan
- h. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian SDM dan administrasi

Selain fungsi pelayanan pelanggan dari beberapa bagian yang telah dijelaskan sebelumnya, PT.PLN juga berkewajiban untuk menyediakan tenaga kelistrikan bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai degan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian kegiatan usaha perusahaan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyedia tenaga listrik
- b. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan konsultasi pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
- c. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan pada pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik.

- d. Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik, melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dalam maupun luar negeri dibidang pembangunan, operasional, telekomunikasi, dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.<sup>27</sup>

## 2.4 Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Sukadamai

Sukadamai adalah nama Desa yang terletak di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pada awalnya Desa Sukadamai adalah bagian dari Kelurahan Ujungbatu, namun setelah tahun 1977 dilakukan pemekaran yang mana di bentuk sebuah Desa baru yang di beri nama "SUKADAMAI".<sup>28</sup>

Desa sukadamai adalah sebuah Desa yang terdapat di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki luas wilayah 1380M<sup>2</sup> yang terdiri dari 99% Dataran Tinggi dan 1% Dataran Rendah. Secara geografis daerah ini berada pada 00.72.67 LU dan 100.55.19 BT, kemudian batas wilayah nya adalah :

Utara : Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Buku Demografi Desa Sukadamai 2020





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**2.5**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatan : Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun dan Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto.

Barat : Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujungbatu.

Timur : Desa Ujungbatu Timur dan Kecamatan Ujungbatu.<sup>29</sup>

**Sambaran Pemerintahan Desa Sukadamai**

**Kepala Desa**

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memimpin jalannya rodan pemerintahan di tingkat Desa. Tanggung jawab utama dari kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyelenggarakan rumah tangga Desa, yaitu pertanggungjawaban di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelnggaran urusan pemerintahan Desa.<sup>30</sup>

**Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa memiliki tugas sebagai staf pembantu Kepala Desa. Yaitu turut menjalankan pemerintahan, pembangunan kemsyarakatan di Desa, serta memberi pelayanan administrasi Kepala Desa. Kemudian fungsi dari sekretaris Desa ini adalah :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kersipan dan laporan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan Desa.

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala Desa, apabila kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas.

#### Kepala Urusan

Kepala urusan ini memiliki kedudukan sebagai pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian tugas dari kepala urusan ini adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, keuangan dan umum dan umum sesuai tugasnya.
- b. Melaksanakan urusan administrasi sesuai tugasnya dalam membantu sekretaris Desa

#### 4. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerja yang sudah ditetapkan. Kepala Dusun memiliki fungsi untuk menjalankan kegiatan yang dilipahan kepala Desa dalam wilayah kerjanya, adapun tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Desa
- c. Melaksanakan kebijakan kepala Desa<sup>31</sup>

<sup>31</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Ketua RW

Ketua RW adalah Perpanjangan Tangan dari Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk menjalankan pemerintahan Desa yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

#### Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga kemasyarakatan di Desa yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam membangun yang akan memadukan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial budaya, agama dan pertahanan dan pertahanan.

#### BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Memiliki tugas yakni membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### 2.6 Jumlah Penduduk

Desa Sukadamai memiliki Jumlah Penduduk 7119 Jiwa, terdiri dari 3910 jiwa laki-laki dan 3209 jiwa perempuan yang tersebar di tiap dusunnya dengan rincian sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk Desa Sukadamai**

No	Nama RW	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	560	1258	970	2228
2	Dusun II	234	515	311	830
3	Dusun III	967	2131	1926	4057
4	Jumlah	1792	3910	3209	7119

Sumber : Kantor Desa Sukadamai 2020

**2.7 Mata Pencaharian**

Mata Pencaharian masyarakat Desa Sukadamai sangatlah bervariasi, mulai dari karyawan, pedagang, buruh tani, sampai dengan petani. Berikut ini adalah rincian mata pencarian masyarakat Sukadamai :

**Tabel 2.2**

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sukadamai**

No	Nama Profesi	Jumlah	Presentase
1	Petani	691	47,88%
2	Pedagang	27	1,45%
3	PNS	197	13,65%
4	Tukang	40	2,77%
5	Guru	92	6,37%
6	Bidan/Perawat	32	2,21%
7	Polri	22	1,52%



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pensiunan	100	6,93%
Sopir	28	1,94%
Buruh	107	7,41%
Jasa Persewaan	10	0,69%
Swasta	87	6,72%
Jumlah	1443	100%

Sumber: Kantor Desa Sukadamai 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Teori Pertanahan

##### Pengertian Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada di atas sekali. Kemudian didalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan sebagai berikut.

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam pasal di atas ialah permukaan bumi.<sup>32</sup> Maka Permukaan Bumi sebagai Bagian Dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang-orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda –benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan selanjutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan bangunan dan bangunan yang terdapat di atasnya. Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan

<sup>32</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain.<sup>33</sup>

#### Teori Hukum pertanahan

Setiap negara memiliki suatu tradisi atau ciri khas nya masing-masing yang berbentuk tradisi, budaya dan hukum. Begitupun indonesia, indonesia memiliki hukum adat yang merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Yang mana hukum adat ini adalah dasar hukum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria<sup>34</sup>

Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama. Sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu kepada hukum adat, baik berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga hukumnya. Konsepsi, asas-asas dan lembaga hukumnya tersebut merupakan masukan bagi rumusan yang akan diangkat menjadi norma- norma hukum tertulis, yang disusun menurut sistem hukum adat. Boedi Harsono menyatakan bahwa<sup>35</sup> :

“Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum positif tanah nasional yang tertulis. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan Hasilnya yang pertama.”

<sup>33</sup>Pasal 500 dan 571 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

<sup>34</sup>Supardi, *op. Cit*, hlm. 52

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsi hukum tanah adat, seperti yang bersifat komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religius dari konsepsi hukum tanah nasional diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”<sup>36</sup>

Dalam rangka pengembangan hukum tanah nasional, maka dimungkinkan para warga negar Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Berkaitan dengan konsepsi hukum adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, terdapat asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum tanah nasional. Adapun asas-asas tersebut adalah asas religius (pasal 1), asas kebangsaan ( pasal 1, 2, dan 9), asas demokrasi ( pasal 9), asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial ( pasal 6, 7, 10, 11, dan 13), asas penggunaan dan pemeliharaan tanah secara berencana ( pasal 14 dan 15 ).

<sup>36</sup>Undang - Undang Pokok Agrarias, Pasal.1





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpatokan pada hukum adat sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum tanah nasional, maka tetap memungkinkan untuk mengadopsi lembaga-lembaga baru yang belum dikenal dalam hukum adat. Di samping itu, dapat pula mengambil lembaga-lembaga hukum asing guna memperkaya dan memperkembangkan hukum tanah nasional. Namun demikian, dalam mengadopsi lembaga-lembaga baru tersebut syaratnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun lembaga-lembaga baru tersebut adalah<sup>37</sup>

- A. Pendaftaran Tanah;
- B. Hak Tanggungan;
- C. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan.

Pada awalnya, Hukum tanah adat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mengenal adanya lembaga pendaftaran tanah. Hal ini menurut Soediharto terjadi karena semula memang tidak diperlukan untuk lingkungan perdesaan, yang lingkup teritorial maupun personalnya terbatas. Dalam lingkungan perdesaan demikian itu para warganya saling mengenal dan mengetahui siapa yang mempunyai tanah yang mana dan siapa melakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah miliknya. Namun sesuai dengan perkembangan zaman maka perlu dibentuk sebuah lembaga pendaftaran tanah guna tercapainya pelayanan tanah yang maksimal.

Lembaga pendaftaran tanah merupakan sebuah lembaga yang dikenal dalam konsepsi hukum pertanahan nasional. Lembaga ini merupakan konsep lembaga

<sup>37</sup>Ibid, hlm. 54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern, karen semua proses yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah, misalnya jual-beli, tukar-menukar dan hibah didaftarkan dan di bukukan dalam buku tanah dan kemudian diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.<sup>38</sup>

#### Sumber Hukum Tanah Nasional

Sumber hukum tanah indonesia, yang lebih identik dikenal pada saat ini yaitu status tanah dan riwayat tanah. Status tanah atau riwayat tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Ada banyak sumber hukum dalam tatanan sumber hukum tanah nasional, seperti hukum tanah adat, kebiasaan, tanah-tanah swarpraja, tanah negara, dan lain-lain. Namundalam garis besarnya penulis menyimpulkan bahwa di indonesia sumber hukum tanah nasional adalah hukum adat yang tebagi 2, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### A. Hukum Tanah Adat

Di Indonesia, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat yang mana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari masyarakat hukum adat setempat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme nasional. Adapun tanah adat terdiri dari 2 jenis, yaitu:<sup>39</sup>

##### Hukum Tanah Adat Masa Lampau

Hukum adat masa lampau ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan jepang. Serta pada zaman Indonesia merdeka

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>39</sup> B.F. Shihombing, *Evolusi kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004, hlm.55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik ataupun tertulis. Jadi, hanya pengakuan.

Adapun ciri-ciri hukum adat masa lampau adalah tanah-tanah yang dimiliki atau di kuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun menurun masih berada di lokasi tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa Sawh, ladang, hutan, dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah yang ada di negara Republik Indonesia.<sup>40</sup>

#### b. Hukum Tanah Adat Masa Kini

Hukum tanah adat masa kini ialah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada aman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti autentik berupa girik, petuk pajak, pipil, hak *agrarische eigendom*, milik yayasan, dan hak hak lainnya sesuai dengan daerah berlakunya hukum adat tersebut, serta diakui secara internal maupun eksternal. Selain hak-hak tersebut, masih da hak hak tanah adat sesuai dengan perkara yang telah diputuskan pengadilan.

Adapun hukum tanah adat masa kini memiliki ciri yaitu tanah-tanah yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat adat dan masyarakat perdesaan atau pun perkotaan, sesuai dengan daerah, suku dan budaya hukumnya kemudian secara turun-menurun telah berpindah tangan kepada orang lain, dan mempunyai

<sup>40</sup>Supriadi, *op. Cit*, hlm. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bukti-bukti kepemilikan serta secara fisik dimiliki atau dikuasai sendiri dan atau dikuasai orang/badan hukum. Secara singkat di katakan sebagai berikut

Ada masyarakat, badan hukum pemerintah/swasta;

Masyarakat di daerah pedesaan/perkotaan;

Turun-menurun atau telah berpindah tangan atau dialihkan;

Mempunyai bukti kepemilikan berupa girik, *verponding* Indonesia, petuk, ketitir, sertifikat, dan lain-lain;

Menguasai secara fisik, berupa mesjid, kuil, gereja, candi, sawah, ladang, gedung, dan lain-lain.<sup>41</sup>

#### 4. Hak Atas Tanah

Hak millik atas tanah dapat dibuktikan dengan 2 hal, Pertama hukum positif berdasarkan bukti bukti tertulis. Kedua klaim masyarakat yang bersifat sosiologis-antropologis berdasarkan pengetahuan masyarkat yang tidak tertulis.<sup>42</sup> Kemudian konsep hak-hak atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama, hak-hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian atas hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Di dalam Undang-undang Pokok Agraria terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu:

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>42</sup> Dianto Bahriadi, *Merampas Tanah Rakyat*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Milik atas tanah (HM);

Hak Guna Usaha (HGU);

Hak Guna Bangunan (HGB);

Hak Pakai (HP).

Selain hak primer atas tanah, terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak atas tanah sekunder ini adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Disebut sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu yang terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu :

- a. Hak gadai;
- b. Hak usaha bagi hasil;
- Hak menumpang;
- Hak menyewa atas tanah pertanian.

Kemudian berbicara tentang hak atas tanah, hak milik atas tanah tersebut adalah salah satu hak yang termasuk dalam kategori hak primer. Sebab hak milik merupakan hak primer yang paling utama dan paling penuh dan terkuat, dibandingkan hak-hak primer lainnya, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak-hak lainnya. Hal itu sesuai dengan dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : “hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan tepenuh yang dapat di punyai orang atas tanah , dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik bisa berlainan di alihkan kepada pihak lain.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut A.P.Parlindungan<sup>43</sup>, kata-kata terkuat dan terpenuhi itu bermaksud untuk membedakannya membedakan dengan hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak lain-lainnya, yaitu untuk menunjukan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki orang bahwa hak miliklah yang "terkuat" (paling kuat dan penuh).

Kemudian di Indonesia hak atas tanah juga terbagi atas bermacam-macam, baik dilihat dari jenis hak maupun dari asal-usul surat tanah atau buktibukti hak. Dengan demikian secara garis besar hak atas tanah dapat dibedakan sebagai berikut :

#### a. Hak Atas Tanah Adat

Menurut Budi Harsono Hak Ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut.<sup>44</sup>

Kemudian Masyarakat hukum adat yang terhimpun dalam kesatuan marga tersebut mempunyai hak atas tanah kemudian dikenal dengan nama "Hak Marga", yaitu hak masyarakat hukum adat yang merupakan hak ulayat dari komunitas adat yang bersangkutan. Hak ini dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama baik secara perseorangan maupun secara berkelompok yang diatur oleh kepala marga. Hak ulayat marga ini pada umumnya tidak mempunyai bukti tertulis dan meliputi

<sup>43</sup> A.P Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 124.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milayah yang cukup luas. Walaupun tidak tertulis akan tetapi dalam kenyataannya tetap diakui baik oleh masyarakat hukum adat maupun oleh masyarakat luas.

#### Hak Perorangan

Hak atas tanah perorangan yaitu hak individu yang ada pada mulanya berasal dari tanah marga. Karena seseorang telah lama dan secara terus menerus bahkan secara turun-temurun mengusahakan tanah marga tersebut, maka anggota masyarakat hukum adat mengakui bahwa tanah marga yang telah diusahakan tersebut menjadi hak individu yang bersangkutan. Hal ini yang menjadi perhatian bahwa sebagian besar tanah adat ini tidak mempunyai bukti-bukti tertulis dan tidak ada surat-surat tanah yang menguraikan hak adat tersebut. Bukti bahwa seseorang memiliki sebidang tanah biasanya dapat diketahui dengan adanya surat jual-beli, surat tanda penyerahan, surat hibah dan surat keterangan Kepala Desa dan Kepala Marga sebagai bukti bahwa perbuatan mereka mengenai penguasaan tanah bersifat terang. Pada umumnya tanah-tanah adat yang mempunyai bukti-bukti hak tersebut diatas statusnya adalah Hak Milik Adat yang dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria hak-hak tersebut dapat dikonversi menjadi salah satu jenis hak menurut Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria dan bukti-bukti yang ada berupa surat-surat tanah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Supriadi, *ibid*, hlm.26



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.<sup>46</sup>

Sebelumnya, di Indonesia pengadaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 1 ayat (3), dan di Perbarui lagi dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tahun 2012 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun BUMN yang dilaksanakan dengan cara mengganti kerugian hak atas tanah dengan cara cara yang sudah diatur.

Selain Pengadaan tanah, perlu juga diketahui pengertian tentang kepentingan umum, mengingat pengadaan tanah di Indonesia senantiasa ditujukan untuk kepentingan umum. Adapun pengertian dari kepentingan umum adalah

<sup>46</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012.





kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun, memberikan pengertian tentang kepentingan umum bukanlah hal yang mudah, selain sangat rentan karena penilaiannya sangat subektif juga terlalu abstrak untuk memahaminya. Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang pasti akan berimbas pada ketidakpastian hukum dan rawan akan tindakan sewenang-wenang dari pejabat terkait. Tapi, Hal tersebut telah dijawab dalam Perpres 65 Tahun 2006 yang kemudian dirampingkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 10 dalam penyelenggaraan pengadaan tanah dimana telah ditentukan secara limitatif dan konkret tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan :

- s. Pertahanan dan keamanan nasional
- Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
- Waduk, bendungan, bendungan irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
- Pelabuhan, bandar udara, dan terminal
- Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi
- Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik
- Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
- Tempat pembuangan dan pengolahan sampah
- Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah
- Fasilitas keselamatan umum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah daerah

Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau

Cagar alam dan budaya

Kantor Pemerintah/kantor Pemerintah Daerah/Desa

Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa

Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah

Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah

jj. Pasar umum dan lapangan parkir umum<sup>47</sup>

Kemudian tentang pengadaan tanah pertama kali diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Kembebasan Tanah kemudian di ganti dengan Permendagri No. 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan cara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi pembebasan Tanah oleh pihak Swasta, dan yang terakhir sebelum diperbarui dengan peraturan yang baru adalah PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1985, tentang Tata cara Mengadakan tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan Wilayah Kecamatan, tetapi ketiga peraturan-peraturan tersebut selalu menimbulkan masalah dan yang dirugikan adalah masyarakat, maka dari itu peraturan baru “pembaharuan hukum” dibuat guna menggantikan peraturan lama yang dianggap tidak sesuai yaitu Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum, kemudian diganti dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

<sup>47</sup> *Op.Cit*, pasal 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan pada tahun 2006 dirubah kembali menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dan sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ini bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak diselenggarakan.<sup>48</sup> Adapun tahap-tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan
- d. Penyerahan hasil.

Kemudian dalam perencanaan pengdaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:

Pemberitahuan rencana pembangunan;

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan

Konsultasi publik rencana pembangunan.

<sup>48</sup>Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.3

Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan dan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

#### Tinjauan Umum PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian

PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat. Sektor ketenaga listrikan yang merupakan sektor jasa dituntut untuk menjaga kualitas pelayanan kerja yang baik pada operasionalnya didalam masyarakat. Berikut adalah tugas umum dan tugas pokok yang tercantum dalam fungsi pelayanan pelanggan.

#### 6. Bagian pemasaran

Bertanggung jawab dalam penyusunan rencana penjualan dan pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada serta melaksanakan kegiatan pelayanan khusus yang diprioritaskan untuk pelanggan potensial agar menjamin terciptanya peningkatan kepuasan pelanggan potensial. Berikut adalah fungsi bagian pemasaran :

- g. Menyusun data potensi pasar, rencana penjualan dan perkiraan pendapatan di daerah kerjanya.
- h. Mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan usaha baru sesuai dengan program yang ditetapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memonitor dan melakukan analisa atas pemakaian energi pada pelanggan pelanggan potensial.
  - j. Mengadakan komunikasi dan memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan.
  - k. Melaksanakan pembacaan meter dengan *Automatic meter reading* untuk pelanggan potensial.
  - l. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian pemasaran.
7. Bagian Niaga
 

Bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan pelanggan, administrasi pelanggan, pembuatan tagihan listrik, dan pengendalian pendapatan untuk menjamin peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan.

Berikut adalah fungsi bagian niaga :

  - i. Melaksanakan Pengawasan terhadap kegiatan pelayanan pelanggan.
  - j. Menyusun dan memelihara Data Induk Pelanggan dan Data Induk Saldo.
  - k. Mengawasi kegiatan Pencatatan Meter dan Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembacaan meter.
  - l. Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka pembuatan tagihan listrik.
  - m. Mengamankan dan mengendalikan pendapatan dengan melaksanakan administrasi pelanggan secara tertib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Melaksanakan pengawasan dan mengkoordinir kegiatan penagihan dalam rangka pengelolaan piutang
- o. Menyusun standar mutu pelayanan serta mengendalikan pencapaiannya
- p. Menyusun laporan sesuai bidang tugas niaga

## 8. Bagian Distribusi

Bagian distribusi bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, merencanakan dan melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi untuk menjamin kontinuitas pelayanan dengan mutu dan keandalan yang memadai, serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan dan pengaturan jaringan distribusi agar dicapai perusahaan energi yang efisien. Berikut adalah fungsi dari bagian distribusi :

- j. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pembangunan sistem.
- k. Menyusun SOP dan mengatur pengoperasian jaringan distribusi.
- l. Menyusun rencana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi.
- m. Mengelola aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan.
- n. Membuat data peta jaringan dan memelihara akurasi data sesuai dengan perkembangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Mengendalikan dan mengawasi fungsi Alat Pembatas dan Pengukur dan menyusun rencana pemeliharanya.
- p. Melaksanakan analisa dan evaluasi susut distribusi serta menyusun upaya pengendaliannya.
- q. Membina dan mengembangkan pekerjaan dalam keadaan bertegangan.
- r. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian distribusi.

## 9. Bagian Keuangan

Bagian keuangan bertanggung jawab dalam pencatatan dan pembukuan aset, perencanaan, dan pengendalian anggaran dan pendapatan sesuai dengan prosedur administrasi dan akuntansinya, untuk menjamin pengelolaan anggaran dan pendapatan yang efektif dan efisien guna peningkatan kinerja keuangan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut bagian keuangan memiliki beberapa fungsi :

- i. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan aset.
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan serta mengadakan rekonsiliasi dengan fungsi terkait.
- k. Menyusun RAO/UAI sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ada
- l. Mengatur dan mengendalikan likuidasi keuangan secara optimal
- m. Melaksanakan supervisi tentang keuangan dan akuntansi terhadap unit asuhannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mengatur dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran investasi maupun operasi
- o. Menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikannya
- p. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian keuangan

## 10. Bagian SDM dan Administrasi

Bagian SDM dan Administrsi ini bertanggung jawab dalam pengembangan dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan kegiatan kesektarian dan umum untuk menjamin kelancaran operasional, serta melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemberdayaan lingkungan.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya berikut adalah beberapa fungsi dari bagian SDM dan Administrasi :

- i. Mencatat dan melaksanakan inventarisasi fasilitas kantor serta meyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaannya
- j. Melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat perhitungan dan melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai sesuai ketentuan yang ada
- k. Menyusun dan memelihara data Induk Kepegawaian serta melaksanakan monitoring dan evaluasi SDM
- l. Melaksanakan pembinaan SDM serta menyusun rencana pembanguna SDM
- m. Merencanakan dan mengelola kegiatan kesektarisan, umum, dan KS



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mengatur penyelesain masalah hukum yang terkait dengan masalah kedinasan , baik di lingkungan internal maupun eksternal
- o. Mengatur dan melaksanakan program kehumasan dan pemberdayaan lingkungan
- p. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian SDM dan administrasi

Selain fungsi pelayanan pelanggan dari beberapa bagian yang telah dijelaskan sebelumnya, PT.PLN juga berkewajiban untuk menyediakan tenaga kelistrikan bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian kegiatan usaha perusahaan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- e. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyedia tenaga listrik
- f. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan konsultasi pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
- g. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan pada pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik.



### Konsultasi Publik

Konsultasi publik merupakan proses komunikasi dialog atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dalam bentuk penentuan perencanaan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>49</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sejak proses awal pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, para pihak pemilik/penguasa tanah sudah diberikan hak untuk dilibatkan dalam musyawarah penetapan lokasi lahan pengadaan tanah. Dengan demikian para pemilik tanah sudah mengetahui bahkan ikut serta dalam penentuan lokasi pembangunan kepentingan umum. Maka dapat disimpulkan bahwa, konsultasi publik ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.

Semudian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 28 sampai 30 :

Konsultasi Publik rencana pembangunan, dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak.

Pelaksanaan Konsultasi Publik dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.

Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk hadir dalam Konsultasi Publik.

5. Undangan disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau melalui perangkat kelurahan/ desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.

Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui: Pengumuman di kantor kelurahan/desa dan/atau Media cetak/surat elektronik.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Kec. Ujungbatu Desa Sukadamai, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Kec. Ujungbatu Desa Sukadamai dianggap belum berhasil, karena prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kepala Desa dan seluruh warga/masyarakat Desa Sukadamai yang menyatakan tidak adanya Konsultasi Publik mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Hal ini mengantarkan penulis untuk mengambil kesimpulan bahwasanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Kecamatan Ujungbatu, Desa Sukadamai tidaklah berhasil.

Pengadaan tanah bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Kec. Ujungbatu Desa Sukadamai tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan pengadaan tanah tersebut belum berhasil, adapun kendalnya berupa : Kurangnya pemahaman tentang regulasi pengadaan tanah yang sesuai menurut Undang-



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang, terbatasnya waktu yang dimiliki untuk proses konsultasi publik dan proses lainnya, dan sulitnya mengumpulkan para pihak yang berhak karena tempat domisili yang jauh dan menyebar.

## Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian di Kec. Jungbato Desa Sukadamai dan memperhatikan data-data yang di peroleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi sehingga bisa menjadi lebih baik kedepanya.

1. Agar terpenuhinya hak-hak warga negara dalam sebuah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu diadakan nya sosialisasi tentang bagaimana seharusnya proses/regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga tidak lagi terjadi polemik mengenai siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prosesnya. Dan diharapkan dengan demikian masyarakat/warga bisa mendapatkan kepastian hukum.

Pendataan awal lokasi terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harusnya dilakukan lebih awal guna tidak teradinya kesulitan terhadap pengumpulan warga/masyrakat saat dilakukan konsultasi publik nantinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Statel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- A.P Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- A.P Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung, Mandar Maju, 2015.
- A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju, 1998.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bernhard limbong, *pengadaan tanah untuk pembangunan, regulasi, kompensasi, penegakan hukum, marga reta pustaka*, Jakarta, 2011
- B.F. Shihombing, *Evolusi kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2004.
- Buku Demografi Desa Sukadama 2020
- BPN RI, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, BPN-RI, 2012
- Gianto Bahriadi, *Merampas Tanah Rakyat*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rakdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mar said dan Suratman, *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang, Setara Press, 2015.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, Jakarta Rajawali Pers, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Rusamadi Murad, *Administrasi Pertanahan*, Bandung, CV Mandar Maju, 2013.

Hakdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2014.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu) ( diakses pada 25 Januari 2020 pukul 22.15)

<http://sinaugeomatika.wordpress.com/2011/12/30/pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-Untuk-kepentingan-umum-antara-regulasi-dan-implementasi>. (diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 20.30 wib)

<https://www.pln.co.id/tentang-kami/pedoman/Perilaku>. (diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 20.45 wib).





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29423  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10404/2019 Tanggal 08 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : MEDDY MELDIOS  
NIM / NIP : 11627103852  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH PT. PLN RAYON PASIR PENGARAIAN DI KEC. UJUNGBATU DESA SUKADAMAI MENURUT UU NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
Lokasi Penelitian : 1. KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU  
2. DESA SUKA DAMAI KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU  
3. PT. PLN RAYON PASIR PENGARAIAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini terbitkan.

Ketentuan pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : http : //dpmpptsp.rokanhulukab .go.id

## REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/013

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu telah membaca Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29423 tanggal 9 Januari 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini dapat diberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MEDDY MELDIOS  
2. NIM : 11627103852  
3. Jurusan : Ilmu Hukum  
4. Gelar : Sarjana (S-1)  
5. Lokasi Penelitian : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh PT. PLN Rayon Pasir Pengaraian di Kecamatan Ujungbatu Desa Sukadamai Menurut UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  
6. Lokasi Penelitian : 1.Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu  
2.Desas Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kab. Rokan Hulu  
3.PT. PLN Rayon Pasir Pengaraian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

an. BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU



GORNENG, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.I / IV.b  
NIP.19740727 200012 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim II Islamic University of Sultan Syarif Kasim II

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
  2. Kantor Camat Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
  3. Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
  4. PT. PLN Rayon Pasir Pengaraian
  5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
  6. Yang bersangkutan





**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**KECAMATAN UJUNGBATU**  
**DESA SUKADAMAI**

Jalan Jendral Sudirman No.10 Sukadamai-Ujungbatu

**REKOMENDASI**

NO : 070/SKD-SEKDES/192

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, meneruskan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/013 tanggal 14 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Riset, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: MEDDY MELDIOS
NIM	: 11627103852
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH PT. PLN RAYON PASIR PENGARAIAAN DI KECAMATAN UJUNGBATU DESA SUKADAMAI MENURUT UU NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Untuk Melakukan	: PENELITIAN DI DESA SUKADAMAI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan Ketentuan Penelitian sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu lancaran kegiatan riset ini.

Dibuat di : Sukadamai  
 Pada Tanggal : 10 Jumadil Akhir 1441 H  
 04 Januari 2020

Kepala desa Sukadamai

**AFRIZAL**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN UJUNGBATU  
DESA SUKADAMAI

Jalan Jendral Sudirman No.10 Sukadamai-Ujungbatu

**SURAT KETERANGAN**  
NO : 070/SK/SKD-SEKDES/154

Surat keterangan tangan dibawah ini :

Nama : AFRIZAL  
Jabatan : Kepala Desa Sukadamai

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Kasim  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara :

Nama : MEDDY MELDIOS  
NIM : 11627103852  
Judul Penelitian : **PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM OLEH PT. PLN RAYON PASIR  
PENGARAIAAN DI KECAMATAN UJUNGBATU DESA  
SUKADAMAI MENURUT UU NO.2 TAHUN 2012  
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Adalah Benar telah selesai melakukan Penelitian, meminta bahan / data / informasi  
dan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sukadamai  
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

Kepala Desa Sukadamai

  
AFRIZAL

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meddy Meldios

NIM : 11627103852

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Oleh PT. PLN Rayon Pasir Pangaraian Di Kec. Ujungbatu Desa Sukadamai Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

Pembimbing : Asril S.HI, S.H,M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIR. 198804302019031010





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PENULIS



**Meddy Meldios**, dilahirkan di Ujungbatu pada tanggal 26 maret 1998. Merupakan Anak Pertama Dari pasangan suami-istri harmonis yaitu Bapak Amrizal dan Ibu Dewi Sartika. Mengenai domisili penulis tidak bisa penulis cantumkan demi alasan keamanan dan privasi. Kemudian dalam riwayat jenjang pendidikannya penulis menempuh pendidikan pertama di TK Melati Ujungbatu, kemudian di lanjutkan di SDN 003 Ujungbatu. Lalu SMPN 1 Ujungbatu dan kemudian melanjutkannya ke SMAN 1 Ujungbatu dan lulus dari tingkan SMA pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di UIN SUSKA RIAU tepatnya di fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Dan disana penulis mengambil konsentrasi HUKUM TATA NEGARA. Kemudian dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 nya penulis membutuhkan waktu 3 Tahun 7 Bulan plus 7 Hari. Dengan predikat sangat Memuaskan.

UIN SUSKA RIAU